

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Partai politik telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetisi dan mendapatkan kendali atas institusi-institusi politik.¹ Kompetisi antar partai politik merupakan bentuk terlaksananya suatu proses demokrasi politik yang dapat memberikan kesempatan kepada setiap partai politik untuk mengedepankan keunggulannya masing-masing dalam menarik simpati rakyat yang diwakilinya. Demokrasi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari topik sistem kompetisi partai.² Persaingan antar partai politik merupakan bentuk dari masih terjaganya demokrasi dalam suatu negara. Partai politik menjadi salah satu indikator yang penting dalam upaya mencapai keberhasilan demokrasi tersebut. Hal itu karena partai politik merupakan bentuk perwakilan rakyat dalam upaya menyampaikan aspirasinya serta bentuk keterlibatan rakyat dalam pemerintahan suatu negara.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok terstruktur yang anggotanya memiliki kesamaan dalam orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita.³ Partai politik dalam hal ini dapat kita pahami sebagai suatu kelompok yang telah bersepakat untuk terikat antara satu anggota kelompok dengan yang lainnya dalam sebuah nilai dan kesepakatan bersama. Orientasi politik dapat

¹ Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta : Institute For Democracy And Welfarism.

² Mellaz, August dan Pipit R. Kartawidjaja. 2018. *Tipologi Partai Politik Dan Skema Pendanaan Partai Politik*. Jakarta Pusat : Sindikasi Pemilu dan Demokrasi. Hal 19. Lebih jelasnya kompetisi partai adalah persaingan partai politik untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum agar dapat memenangkan persaingan tersebut sebagai representasi dukungan dari masyarakat terhadap partai politik sebagai perwakilannya.

³ Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

diartikan bentuk dari upaya mencapai tujuan dari sebuah partai politik. Ditinjau dari prinsip-prinsip dan orientasinya, partai politik dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.⁴

Kaare Storm dan Muller mengidentifikasi tiga orientasi politik yang berbeda. Pertama, ada "*the policy seeking party*," yang fokus pada mencapai dampak kebijakan yang maksimal, sebagaimana tercermin dalam literatur tentang peran partai politik. Kedua, ada "*the votes seeking party*," yang bertujuan untuk memaksimalkan jumlah suara mereka untuk memenangkan pemilu dan mendapatkan kendali atas pemerintahan. Terakhir, ada "*the office seeking party*," yang berusaha memaksimalkan manfaat dan kendali atas jabatan yang mereka pegang.⁵

Jika dilihat berdasarkan ketiga orientasi politik diatas, orientasi partai politik yang ada di Indonesia cenderung bias terhadap orientasi kebijakan berdasarkan ideologi partai. Kecenderungan ini tercermin dalam beberapa fenomena belakangan ini: (a) partai-partai politik cenderung beroperasi secara pragmatis, (b) munculnya oligarki dalam struktur partai politik, (c) orientasi partai politik pada penguasaan kekuasaan, bukan didasarkan pada konsistensi ideologis, (d) partai politik belum sepenuhnya berhasil mengintegrasikan ideologi mereka ke dalam masyarakat secara menyeluruh.⁶ Orientasi partai politik dapat kita lihat juga

⁴ Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Grasindo. Halaman 155

⁵ Mellaz, August dan Pipit R. Kartawidjaja. *Op.cit*, hal 19-21.

⁶ Wibowo, Tri Agung Budi. 2020. Orientasi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dalam Pembentukan Koalisi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020. *Skripsi Mahasiswa Universitas Andalas*, hal 1-2.

dari bentuk kerjasama suatu partai politik dengan partai politik yang lain, atau lebih dikenal sebagai koalisi partai politik.

Untuk mencapai tujuan bersama, maka partai politik juga harus membuat sebuah koalisi yang lebih besar yang terdiri dari beberapa partai politik lainnya agar mendapatkan kekuatan yang lebih besar untuk memenangkan kompetisi pemilu dan kemudian mencapai tujuan politiknya mendapatkan suatu kekuasaan. Menurut Heywood, koalisi adalah ketika aktor-aktor politik yang sebelumnya bersaing dipersatukan, entah karena mereka merasakan ancaman yang sama atau menyadari bahwa tujuan mereka tidak bisa terwujud jika bekerja secara terpisah.⁷ Dengan kata lain koalisi adalah cara yang dilakukan oleh beberapa partai politik untuk dapat mencapai tujuan dari partai politik yang lebih besar.

Menurut Hinckley ada 3 (tiga) motif dalam sebuah koalisi partai politik : a) mencari efisiensi (*seek efficiency*), yaitu biaya dan keuntungan bergabung dengan partai politik, bahkan dengan kekuatan koalisi minimum, b) menjadi pemegang kontrol (*seek control*) dalam koalisi dengan bekerjasama atau bergabung dengan partner terlemah, c) mengamankan diri (*seek security*) dari beberapa koalisi, yaitu berkoalisi dengan pemegang sumber daya terbesar.⁸

Koalisi partai politik tentu saja bertujuan untuk dapat meraih kemenangan dalam kompetisi politik, salah satunya adalah pada kompetisi pemilihan kepala daerah yang merupakan kompetisi untuk dapat melegitimasi kekuasaan. Mendapatkan kekuasaan pada pemerintahan merupakan salah satu bentuk dari

⁷ Pamungkas Sigit. *Op.cit*, hal 77.

⁸ Pamungkas Sigit. *Op. cit.* hal 83-84

orientasi partai politik, yaitu maksimalisasi manfaat dan kontrol dengan kekuasaan yang dimilikinya. Oleh karena itu, untuk dapat memenangkan kompetisi seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada umumnya partai politik melakukan koalisi dengan partai politik lainnya.

Koalisi partai politik secara normatif dilakukan atas dasar ideologi atau berdasarkan prinsip yang sama. Tujuannya adalah agar dapat memperjuangkan asas-asas ideologi partai sehingga dapat diterapkan pada proses pembentukan kebijakan. Ideologi partai politik dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki partai politik terhadap suatu nilai yang diterima secara fakta dan kebenarannya oleh partai politik.

Partai Masyumi merupakan hasil dari peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagai satu-satunya partai politik yang berbasis Islam pada saat itu, Masyumi mendapat dukungan luas dari organisasi-organisasi keagamaan yang sudah ada sebelumnya, seperti NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam), dan lainnya. Dukungan yang besar dari berbagai organisasi tersebut membantu Masyumi tumbuh dengan cepat dan menjadi salah satu partai besar di Indonesia.⁹

Pada puncak kejayaannya, Partai Masyumi meraih suara terbanyak di seluruh nusantara pada pemilu pertama yang diselenggarakan. Suara Masyumi tersebar di berbagai daerah pemilihan, dengan jumlah terbanyak berasal dari Jawa Barat. Namun, jika dilihat dari persentasenya, suara terbanyak diperoleh dari daerah

⁹ Siregar, Insan Fahmi. 2013. 'Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960). *Jurnal Thaqaifiyyat*, Vol. 14. No 1 .

pemilihan Sumatera Tengah, mencapai 50,8%. Rincian perolehan suara Masyumi berdasarkan daerah pemilihan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Perolehan Suara Partai Masyumi Pada Pemilu Pertama Indonesia Tahun 1955

NO	Daerah Pemilihan	Suara yang diperoleh	%Suara daerah	Keluar sebagai no	Kursi yang didapat
1	Jakarta Raya	200.460	26,0	1	2
2	Jawa Barat	1.844.442	26,4	1	3
3	Jawa Tengah	902.387	10,0	4	6
4	Jawa Timur	1.109.742	11,2	4	7
5	Sumatera Selatan	628.382	43,2	1	4
6	Sumatera Tengah	797.692	50,8	1	6
7	Sumatera Utara	789.910	36,9	1	6
8	Nusa Tenggara Barat	264.719	21,2	2	2
9	Nusa Tenggara Timur	157.792	21,2	2	1
10	Kalimantan Timur	44.347	25,7	1	
11	Kalimantan Barat	155.173	33,2	1	1
12	Sulawesi Utara/Tengah	189.199	25,0	1	1
13	Sulawesi Selatan/Tenggara	466.255	40,0	1	
14	Maluku	117.440	35,4	1	1
	Jumlah	7.903.886			57

Sumber: *Insan Fahmi Siregar, hal 97-98.*

Data dalam tabel menunjukkan bahwa Masyumi berhasil memperoleh suara terbanyak di 10 dari total 14 daerah pemilihan di seluruh Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa Masyumi memiliki pengaruh yang luas di berbagai wilayah di Nusantara, melebihi partai-partai lain pada masa itu.

Setelah beberapa waktu berkiprah dan pernah menjadi salah satu partai politik Islam terbesar di Indonesia, pada akhirnya partai Masyumi mendapatkan pergolakan baik dari dalam maupun luar partai. Perubahan dalam dinamika politik, terutama saat transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin, mempengaruhi eksistensi partai Masyumi. Sejumlah persoalan politik turut

memengaruhi keanggotaan Masyumi. Berkurangnya jumlah anggota Masyumi, baik karena keluarnya anggota istimewa maupun terhambatnya aktivitas partai di beberapa wilayah, tentu berdampak signifikan terhadap kekuatan politik Masyumi secara keseluruhan.

Kekuatan politik Masyumi terus mengalami penurunan. Berkurangnya anggota Masyumi semakin memberikan kesempatan bagi lawan politik Masyumi untuk melakukan tekanan terhadap partai tersebut. Soekarno secara cermat melihat perkembangan ini, dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus menerus memberikan tekanan pada Masyumi. Tekanan yang diberikan Soekarno pada Masyumi semakin meningkat seiring berjalannya waktu, hingga pada akhirnya Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran Masyumi pada tanggal 17 Agustus 1960.¹⁰

Setelah lebih dari lima puluh tahun berada dalam kevakuman, Partai Masyumi, yang telah bubar pada masa kepresidenan pertama Republik Indonesia di bawah Soekarno, kini diumumkan kembali. Deklarasi ini dipimpin oleh tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Cholil Ridwan. Peringatan milad ke-75 Masyumi pada tanggal 7 November 2020 menjadi momen penting bagi deklarasi Partai PPII Masyumi ini. Salah satu peristiwa terpenting adalah deklarasi oleh tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), yang bertujuan untuk menghidupkan kembali semangat Masyumi. MS Kaban menyatakan, "Tokoh-tokoh berkumpul untuk membangkitkan kembali semangat Masyumi, yang kini dikenal

¹⁰ *Ibid*, hal 101

sebagai PPII Masyumi atau lahir kembali."¹¹ Partai Masyumi memang telah lama dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno. Namun untuk menindaklanjuti perjuangan partai Masyumi, didirikanlah Partai Politik Islam Indonesia (PPII) Masyumi. *"Kami reborn bukan dengan nama Masyumi, akan tetapi Partai Politik Islam Indonesia Masyumi."* Jelas ketua DPW PPII Masyumi Sumbar Budiman Datuak Bandaro Rajo kepada Tribun Padang.com, Jum'at (21/2/2020).¹²

Menurut Budiman Datuak Bandaro Rajo, dengan dihidupkan kembali, pemerintah tidak menolak karena namanya sudah berubah menjadi PPII Masyumi. Pada tahun 2019 partai Masyumi dideklarasikan kembali karena sudah beberapa kali pemilu PPII Masyumi tidak ikut serta kontestasi politik karena tidak terverifikasi disebabkan pengurusnya tidak lengkap. Oleh karena itu mereka bertekad agar Masyumi dihidupkan kembali dan ikut serta dalam dinamika politik di Indonesia karena kekecewaan terhadap partai politik lainnya.

Menjelang pelaksanaan Pilkada Sumbar PPII Masyumi wilayah Sumbar menyatakan dukungan politiknya pada pasangan Nasrul Abit-Indra Catri pada Pilkada Sumbar 2020. Dukungan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Mahyeldi yang menjadi calon kepala daerah Sumbar yang diusung persatuan partai politik Islam (PPPI), yaitu PKS dan PPP dianggap tidak amanah terhadap janjinya untuk menuntaskan kepemimpinannya sebagai walikota Padang, meskipun simpatisan

¹¹Ernes, Yogi. 2020. "Partai Masyumi Reborn Dideklarasikan Singgung PKS Tak Tampung Umat". Detik News.

https://news.detik.com/berita/d-5245227/partai-masyumi-reborn-dideklarasikan-singgung-pks-tak-tampung-umat_diakses_tanggal_06_Agustus_2021

¹²Anastasia, Citra Augusta Putri. 2020. "Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Bakal Kukuhkan Pengurus DPD Se-Sumatera Barat.

https://padang.tribunnews.com/2020/02/21/partai-politik-Islam-Indonesia-Masyumi-bakal-kukuhkan-pengurus-dpd-se-sumatera-barat_Diakses_tanggal_06_Agustus_2021

PPII Masyumi merupakan pendukung Mahyeldi diwaktu pemilihan walikota Padang sebelumnya.

Pasangan calon Nasrul Abit-Indra Catri merupakan pasangan calon yang diusung oleh satu partai politik saja, yaitu partai Gerindra. Partai Gerindra merupakan partai yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan legislatif di Sumbar tahun 2019 dan mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Sumbar, yaitu 14 dari 65 kursi dengan persentase 21,53 dari total keseluruhan suara sah pemilihan legislatif di Sumbar. Dengan begitu berdasarkan peraturan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen, partai Gerindra dapat mengusung pasangan calon kepala daerah karena sudah memenuhi persyaratan peraturan ambang batas parlemen yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung pasangan calon kepala daerah dengan minimal 20 persen dari total kursi parlemen atau 25 persen dari total suara sah di tingkat provinsi.

Dukungan yang diberikan PPII Masyumi kepada pasangan calon Nasrul Abit-Indra Catri menjadi suatu fenomena yang mencuri perhatian publik. Karena Sumbar merupakan salah satu daerah yang menjadi tempat berkembangnya partai Masyumi pada masa keemasannya, yaitu sebagai wilayah bagian dari Sumatera Tengah saat belum terjadinya pemekaran oleh Soekarno. Dengan begitu aktor-aktor maupun simpatisan partai Masyumi yang masih ada berupaya untuk tetap memperjuangkan nilai-nilai dan ideologi yang dimiliki oleh partai Masyumi. Oleh karena itu pernyataan dukungan yang diberikan PPII Masyumi menurut peneliti memiliki pengaruh tersendiri terhadap orientasi politik partai Masyumi yang baru dideklarasikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melihat fenomena orientasi yang berbeda dari PPII Masyumi pada Pilkada Sumbar 2020. Secara normatif PPII Masyumi harusnya mengikuti koalisi Persatuan Partai Politik Islam (PPPI), yaitu PKS dan PPP karena PPII Masyumi merupakan partai politik yang berideologi Islam, namun justru memiliki orientasi tersendiri pada Pilkada Sumbar 2020. Maka dari itu peneliti akan membahas tentang **“Orientasi Politik Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Pada Pilkada 2020 Di Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Partai Politik Islam Indonesia Masyumi atau yang lebih dikenal dengan PPII Masyumi merupakan partai Masyumi yang baru saja dideklarasikan kembali setelah lama tidak ikut serta dalam kancah politik nasional maupun di daerah. Reinkarnasi partai Masyumi ini menjadi suatu fenomena yang menarik perhatian publik. Kehadiran partai Masyumi menurut tokoh-tokoh yang memperhatikan perkembangan partai politik Islam didasari oleh belum terealisasinya nilai-nilai Islam dalam partai politik dengan baik, sehingga aktor-aktor partai Masyumi merasa perlu untuk menghidupkan kembali partai politik yang pernah berjaya sebelum masa reformasi.

Partai Masyumi dikategorikan kepada partai politik Islam yang dilihat dari setiap aktifitas partai yang selalu mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai suatu hal yang harus diperjuangkannya. Pada awal pelaksanaan musyawarah oleh para tokoh Masyumi, hasilnya menunjukkan bahwa pertama, Masyumi adalah sebuah partai politik yang berbasis Islam. Kedua, Masyumi adalah satu-satunya partai politik

yang mewakili umat Islam. Ketiga, Masyumi bertujuan untuk memperkuat persiapan umat Islam untuk berjihad *fi sabilillah* dalam melawan segala bentuk penjajahan. Keempat, Masyumi bertujuan untuk memperkuat pertahanan Indonesia dengan menyusun barisan *sabilillah* di daerah-daerah. Kelima, Dr. Soekiman dipilih sebagai ketua, dengan Abikusno dan Wali Al Fatah sebagai wakil ketua. Ketiga orang tersebut diberi mandat untuk menyusun kepengurusan Masyumi.¹³

Secara normatif partai Masyumi sebagai partai politik Islam tentunya mengikuti arah pergerakan dari koalisi partai politik Islam. Namun menjelang pelaksanaan Pilkada Sumbar tahun 2020, PPI Masyumi justru tidak sependapat dengan koalisi persatuan partai politik Islam (PPPI), yaitu PKS dan PPP yang ada di Sumbar yang mendukung pasangan calon Mahyeldi-Audy pada Pilkada calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar, melainkan mendukung pasangan Nasrul Abit-Indra Catri yang bukan dari koalisi partai politik Islam melainkan partai nasionalis.

Mereka memberikan dukungan karena mereka percaya bahwa pasangan calon nomor urut 2 lebih dapat dipercaya dibandingkan dengan kandidat lainnya. Kesepakatan dukungan tersebut diperoleh setelah melalui pertimbangan dan persetujuan dari anggota DPD Masyumi di Sumatera Barat dalam pertemuan di Padang, Senin (23/11). Budiman kemudian menjelaskan mengapa mereka memilih Nasrul Abit-Indra Catri daripada calon lain, termasuk Mahyeldi-Audy. Menurutnya, mayoritas anggota Masyumi ingin agar Mahyeldi terus melayani Kota Padang. Ini disebabkan oleh mayoritas anggota Masyumi yang sebelumnya menjadi

¹³ *Ibid*, hal 90-91

tim sukses Mahyeldi saat dia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang.¹⁴ Mereka ingin Mahyeldi sebagai walikota Padang hendaknya dapat menuntaskan amanah yang sedang berada dipundaknya.

Alasan dari tidak bergabungnya partai Masyumi dengan PPPI dalam mengusung Mahyeldi-Audy dikarenakan Mahyeldi yang kerap dipanggil ‘buya’ sebelumnya adalah walikota Padang yang dianggap tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin di Kota Padang hingga akhir masa jabatannya. Oleh karena itu melalui musyawarah bersama, pengurus partai Masyumi kemudian menyatakan dukungannya terhadap calon gubernur dan wakil gubernur Nasrul Abit-Indra Catri.

Berdasarkan realitas tersebut peneliti berasumsi bahwasanya dalam menentukan orientasinya, PPII Masyumi tidak menjadikan ideologi sebagai alasan utama dalam berkoalisi atau memberikan dukungan politik terhadap orientasi politiknya pada Pilkada gubernur-wakil gubernur Sumbar. Sehingga dalam menentukan orientasi politiknya pada Pilkada Sumbar 2020 PPII Masyumi lebih terbuka dalam menentukan dan menyatakan dukungannya terhadap partai politik lainnya.

Oleh karena itu, sikap dalam menentukan orientasi politik dari partai Masyumi menjadi suatu fenomena yang menarik dan perlu dikaji lebih mendalam agar dapat menemukan jawaban yang konkrit atas fenomena tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana

¹⁴Tim detikcom. 2021. “Partai Masyumi Dukung Nasrul Abit-Indra Catri di Pilgub Sumbar”. Detik News. [https://news.detik.com/berita/d-5268576/partai-Masyumi-dukung-nasrul-abit-indra-catri-di-pilgub-Sumbar_Diakses tanggal 06 Agustus 2021](https://news.detik.com/berita/d-5268576/partai-Masyumi-dukung-nasrul-abit-indra-catri-di-pilgub-Sumbar_Diakses%20tanggal%2006%20Agustus%202021)

Orientasi Politik Partai Politik Islam Indonesia Masyumi Pada Pilkada 2020 Di Sumatera Barat?''.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap "Orientasi Politik Partai Politik Islam Indonesia Masyumi pada Pilkada Sumatera Barat 2020", dengan mempertimbangkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disajikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini, maka diharapkan dapat menghasilkan manfaat, baik secara akademis dan praktis :

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana orientasi partai politik Masyumi pada Pilkada Sumatera Barat 2020. Penemuan ini nantinya dapat memberikan kebaruan dalam bidang studi Ilmu Politik di jurusan Ilmu Politik tentang orientasi politik, khususnya PPII Masyumi di Sumatera Barat 2020.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih kepada stakeholder yang berkaitan dengan politik, lebih khususnya partai politik dalam upaya membenahi kelembagaannya melalui hasil yang telah didapatkan dalam penelitian ini.